

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keraton Yogyakarta atau yang sering disebut Kraton Yogyakarta Hadiningrat terletak di jantung provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Indonesia karena tempatnya di tengah tengah Kota Yogyakarta dimana ketika kita mengambil garis lurus antara Gunung Merapi dan Laut Kidul maka kraton menjadi pusat keduanya. Kraton Yogyakarta merupakan kerajaan terakhir yang berjaya di tanah Jawa. ketika kerajaan Hindu Budha berakhir kemudian di teruskan dengan kerajaan Islam di Demak, lalu berdiri kerajaan lain seperti Mataram Islam yang di dirikan oleh Pakubuwana 1. Hingga sekarang kraton Yogyakarta masih menyimpan kebudayaan yang mengagumkan.

Peranan Sultan sebagai simbol kepemimpinan kharismatik, secara kosmologis dapat memerankan diri sebagai mediator dari dua kekuatan dan kekuasaan status kekuasaan Sultan ini terrefleksi dalam konsep kekuasaan Islam. Fungsi Sultan Hamangkebuwono sebagai mediator kosmologis antara misi kerajaan Islam dengan realitas masyarakat Yogyakarta yang pluralis. Status sultan dalam Islam adalah *khalifatullah fil ardhi syidin panotogomo* (Wakil Tuhan di muka bumi) berfungsi sebagai pemeliharaan kelanggengan agama. (Zulkili, 2013:55) Yogyakarta sendiri masih mempertahankan pemerintahan Kerajaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat

ini dilandasi dengan payung hukum yang khusus yaitu Undang Undang No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada tahun 2012 telah syah menjadi Undang Undang yang berarti Gubernur dan Sultan menjadi satu kesatuan begitu juga dengan jabatan wakil gubernur yang di jabat oleh Sri Paduka Pakualam dengan adanya Undang Undang Keistimewaan DIY ini maka secara tidak langsung hak masyarakat dalam berdemokrasi yaitu hak memilih dan dipilih secara langsung telah direduksi, serta partai politik sebagai salah satu instrument dalam sistem politik sebagai "kendaraan" politik calon kepala daerah, dalam hal ini adalah mengajukan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, tidak dapat dilakukan karena adanya peraturan tersebut (Kariem,2015:10). Sepanjang sejarah sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi dewasa ini, kedudukan dan peranan kepala daerah dengan berbagai macam penyebutan seperti Gubernur, Walikota, Bupati telah menyebutkan eksistensinya, baik sebagai pemimpin yang mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, maupun memimpin dalam organisasi administrasi masyarakat (Wijaya, 2013:34) sedangkan Implikasi dari produk hukum UU no 32 tahun 2004 kedudukan pemerintah di daerah adalah gubernur di pilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum daerah.

Proses pemilihan kepala daerah menjadi inti permasalahan dalam perdebatan draft RUU keistimewaan Yogyakarta. Sehingga, tidak semua rakyat Yogyakarta memiliki aspirasi politik yang sama. Ada lapisan sosial yang mendukung berlakunya sistem pemerintahan feodal melalui penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur otomatis pada Hamengku Buwono dan Paku Alam. Namun, ada juga rakyat

Yogyakarta yang menghendaki pemilihan kepala daerah melalui pemilihan dalam bingkai demokrasi modern.

Pemikiran ke depan dan melihat konteks zaman yang sudah berubah, itulah yang salah satu bisa terbaca saat Sultan HB X dalam dua bulan terakhir mengeluarkan tiga sabda tama dan sabda raja. Pada sabda tama yang disampaikan 6 Maret 2015, Sultan HB X lebih merespons perdebatan di DPRD DI Yogyakarta dan di masyarakat mengenai peraturan daerah istimewa (PERDAIS) sebagai kelanjutan dari UU No 13/2012, terutama terkait dengan pengisian jabatan gubernur/wagub. Sabda Tama itu untuk merespons persoalan kemasyarakatan meskipun secara tersurat Sultan HB X juga menegaskan, soal suksesi di Keraton Yogyakarta sudah ditentukan. Sabda Tama ini sejalan dengan Sabda Tama yang pernah dikeluarkan oleh Sultan HB X sebelumnya, tahun 2012, yang terkait dengan keistimewaan DI Yogyakarta.

Sabda Raja sebenarnya lebih bersifat untuk ke dalam kraton. Pada Sabda Raja yang dikeluarkan 30 April 2015, Sultan HB X mengubah namanya dari Buwono menjadi Bawono serta meniadakan gelar Kalifatullah dan mengubah sebutan dari kaping sedasa menjadi kaping sepuluh. Sedasa adalah kata dalam bahasa Jawa krama inggil, tingkatan tinggi, yang bermakna sepuluh. Sepuluh adalah kata dalam bahasa Jawa ngoko, yang dipakai oleh khalayak.

Dengan mengubah sebutan itu terasa Sultan HB X ingin menempatkan diri, ataupun pemimpin Keraton Yogyakarta selanjutnya, adalah manusia biasa yang setara dengan manusia lain. Egaliter. Bukan sosok yang harus selalu dilayani dengan tinggi,

termasuk dalam berbahasa. Apalagi, dia bukan lagi wakil Allah atau nabi di dunia (kalifatullah).

Gelar dan nama lengkap sultan di Keraton Yogyakarta adalah Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati ing Ngalaga, Ngabdurahman Sayidin Panata Gama, Kalifatullah Inkgang Jumeneng iing ngayogyakarta hadiningrat kaping.... {sesuai urutan, seperti sasasa atausepindah (kesatu), kalih (kedua) dan sekawan (keempat)}

Dalam sabda raja tertanggal 30 April 2015, Sultan HB X menyatakan memperbarui perjanjian pendiri Mataram, yaitu Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan serta menyempurnakan keris ageng (agung) Keraton Yogyakarta, Kiai Kopek dan Kiai Joko Piturun. Ki Ageng Giring (III), yang merupakan keturunan dari Brawijaya, raja Majapahit dalam kisah pewarisan kekuasaan di Jawa, adalah orang yang menerima wahyu untuk menurunkan raja. Namun, wahyu yang digambarkan berbentuk kelapa muda itu justru diminum oleh Ki Ageng Pemanahan yang datang ke rumahnya, yang dahulu diperkirakan di Gunung Kidul, DI Yogyakarta.

Keduanya pun bersepakat, keturunan Ki Ageng Giring akan berkesempatan pula memimpin tanah Jawa. Keturunan itu diyakini oleh sebagian kerabat keraton, adalah garis lelaki, karena simbol yang dipakai terkait dengan sultan atau pergantian sultan (suksesi), adalah keris, Kiai Kopek dan Kiai Joko Piturun. Kiai adalah sebutan untuk lelaki, sedangkan untuk perempuan disebut nyai. Dalam pemahaman

masyarakat Jawa, kata menyempurnakan (nyampurnakake) tidak hanya berarti membuat menjadi sempurna, tetapi juga bisa bermakna mematikan atau menghilangkan.

Jika Sultan HB X menyempurnakan kedua keris itu, bisa saja diartikan meniadakannya. Kiai Kopek adalah keris kebesaran yang dipakai oleh sultan. Kiai Joko Piturun adalah keris yang diberikan kepada putra mahkota. Makna menyempurnakan sebagai meniadakan kian kuat karena dalam sabda raja tertanggal 5 Mei 2015, yang mengubah nama GKR Pembayun, putri sulung Sultan HB X menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram, yang bisa diartikan juga sebagai pengangkatan putri mahkota, tidak disertai dengan penyerahan keris Kiai Joko Piturun. Keris itu untuk lelaki. Hamemayu hayuning bawono langgeng diartikan mengupayakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan di alam yang lestari. Bawonomempunyai makna lebih luas dibandingkan dengan buwono, yang hanya berarti dunia.

Transisi politik tradisonal menuju modernisme politik mengakibatkan polarisasi sikap politik. Sikap politik yang menginginkan tuntutan demokratisasi melalui mekanisme demokrasi prosedural di satu pihak dan pengakuan atas berlangsungnya proses kepemimpinan kultural di pihak lain, atau upaya untuk mendorong terciptanya proses ke arah rasionalitas politik di satu sisi, yang sekaligus memuat makna pemberian penghargaan relatif atas fakta kepemimpinan tradisonal yang masih memiliki berbagai legitimasi, baik dari

persepektif kultural maupun historis (Wijaya, 2002:35). Hal ini menggambarkan dinamika politik lokal Yogyakarta dalam merespon pro dan kontra RUUK Yogyakarta.

Dinamika politik di fraksi DPRD DIY mengenai keistimewaan DIY khususnya pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY ini menunjukkan bahwa proses penyusunan draft RUU merupakan sebuah kerja politik. Sebagaimana layaknya sebuah kerja politik, maka tidak bisa dihindari bahwa munculnya spekulasi politik, analisis kepentingan, dan kecurigaan-kecurigaan politik akan senantiasa menjadi faktor ikutan dari proses yang sedang berlangsung. Ada yang mengkhawatirkan polemik pemaknaan RUUK DIY ini akan menjadi komoditas dan perebutan kepentingan antar partai politik di DPRD DIY .Rancangan Peraturan Daerah Keistimewaan (Raperdais) tentang Pengisian Jabatan dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY disahkan menjadi Peraturan Daerah Keistimewaan (Perdais) oleh DPRD DIY.(liputan 6,2015)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DI Yogyakarta kini sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah Keistimewaan (Raperdais). Salah satu titik perhatian dalam Raperdais ini adalah persyaratan menjadi Gubernur DIY.Sesuai undang-undang yang ada, Sultan Yogyakarta otomatis menjadi Gubernur DIY. Muncul wacana, dimungkinkan adanya gubernur perempuan, yang pada gilirannya bermakna Sultan Yogyakarta pun bisa seorang perempuan. Perdebatan menyangkut

hal ini didasarkan pada perubahan zaman yang menuntut kesetaraan hak tanpa melihat gender.

Namun ketua panitia raperdais, slamet kepada VOA mengatakan DPRD DIY tidak akan masuk dalam perdebatan apakah sultan boleh perempuan atau harus laki laki. Sosiolog dan aktivis sosialimam Samroni kepada VOA mengatakan paugeran atau mekanisme di dalam pergantian raja, khususnya di aataram hanya dikenal sultan bukan sultanah jika dilihat dari sisi gender. Bahwa kemudian ada rujukan sejarah misalnya wangsa syailendra memeunculkan pramodya wardani dan di kerajaan Tri Bawana Tunggadewi, maka itu ada;lah sistem kerajaan yang munculnya wacana sultan perempuan akan mendapat dampak luar biasa termasuk ,erubah undang undang keistimewaan itu sendiri.

Teredukasinya hak hak partai politik di Daerah Istimewa Yogyakarta,hal ini juga akan berimplikasi pada berkurangnya *berganing* partai politik ditingkat dewan perwakilan wilayah. Partai-partai politik melalui fraksi fraksinya di DPRD DIY memiliki kesepakatan yang dibuat bersama dengan pemerintah daerah mengenai konsep keistimewaan DIY, yang sebelumnya telah tertuang dalam RUUK DIY yang kini telah menjadi Undang Undang adik Sri Sultan HB X tetap tidak sepakat dengan perintah (Sabda) Raja Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X, lima belas putra dan putri mendiang Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan pernyataan sikap melalui surat terbuka kepada Sri Sultan HB X.

Adik tiri Sultan HB X, GBPH Prabukusumo (dari ibu KRAy Hastungkoro) memaparkan, surat terbuka tertanggal 12 Januari 2016 itu ditandatangani empat anak tertua dari masing-masing istri Sultan HB IX, mewakili 15 putra-putri Sultan HB IX.

Mereka adalah GBRAy Murdokusumo (anak Sultan HB IX dari ibu KRAy Pintoko Purnomo), KGPH Hadiwinoto (adik kandung Sultan HB X, anak dari ibu KRAy Windyaningrum), GBPH Prabukusumo, serta GBPH Pakuningrat (dari ibu KRAy Ciptamurti).

Surat tersebut telah dikirim, ditujukan kepada Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Panitrapura Kraton Yogyakarta GKR Condrokirono yang tidak lain putri kedua Sri Sultan HB X.

Surat tersebut berisi tiga poin. Pertama, Keraton Yogyakarta adalah lembaga adat dan warisan budaya, sehingga seorang sultan bukanlah pemilik keraton, tetapi hanya sebagai pemimpin adat. Karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan keraton harus sesuai tata *keprajan* dan *paugeran* keraton sebagai institusi adat.

Kedua, Keraton Yogyakarta secara historis kultural adalah warisan budaya Kasultanan Trah Hamengku Buwono, sehingga segala sesuatu yang menyangkut suksesi, *kalenggahan* dan *kalanggengan* keluarga besar Hamengku Buwono harus sesuai *paugeran* keraton yang sudah berlangsung turun-temurun dan telah banyak dicontohkan oleh para leluhur.

Ketiga, yang bertahta di Keraton Yogyakarta saat ini adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X, sehingga semua sabda selain dari nama tersebut tidak memiliki legitimasi.

GBPH Prabukusumo mengatakan, surat terbuka itu hasil kesepakatan 15 saudara Ngarsa Dalem setelah rapat tertutup pada 6 Januari lalu. Gusti Prabu menegaskan, ia dan saudara-saudaranya tidak mengakui sabda-sabda yang dikeluarkan Sultan yang menggunakan nama Hamengku Bawono X.

Sedang GBPH Yudhaningrat mengatakan, saat ini para *Rayi Dalem* (adik-adik Sultan HB X) termasuk dirinya, tinggal menunggu jawaban dan penjelasan dari Sultan HB X berkait *Sabda Jejering Raja*. Pihaknya berharap dalam waktu dekat, Sultan HB X bisa segera memberikan penjelasan kepada *Rayi Dalem* dan masyarakat luas.

"Kalau ditanya kapan penjelasan itu akan disampaikan, saya tidak tahu, jadi belum bisa berkomentar banyak. Karena saat ini kami juga masih menunggu kepastian dari Sri Sultan HB X," ungkap Yudhaningrat.

Menanggapi hal tersebut, menantu Sri Sultan Hamengku Buwono X, KPH Purbodiningrat menyatakan, Kraton Yogyakarta, tidak akan menjelaskan ke publik terkait isi dan makna dari *Sabda Jejering Raja*, karena merupakan ranah internal Kraton.

"Karena ini internal, jadi kita memikirkan manfaat dan mudaratnya," kata Purbodiningrat Sabtu (16/1).

Dia mengungkapkan, Keraton Yogyakarta telah memberikan kopi naskah *Sabda raja* Sedang Penghageng Kawedanan Hageng Panitraputra Kraton Yogyakarta, GKR Condrokirono mengaku, belum menerima surat terbuka dari *Sedherek Dalem* atau putra-putri Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan HB X.

Polemik pengangkatan GKR pembayun ini menjadi kontroversi di kalangan DPRD maupun di kalangan Kraton sendiri melihat kondisi ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di DPRD DIY periode 2014-2019. Berdasarkan hal tersebut , penulis bermaksud untuk melihat lebih lanjut penelitian inidengan judul” **Persepsi DPRD DIY Masa Bakti 2014-2019 Pada Wacana Kepemimpinan Sultan Perempuan Di Keraton Yogyakarta**”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimna pandangan DPRD DIY tentang wacana Sultan Perempuan di kraton Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah maka tujuan penelitian diperoleh sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan DPRD DIY tentang wacana Sultan Perempuan di Kraton Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana kemungkinan Sultan Perempuan sebagai khalifatullah menurut etika estetika, logika pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana sikap dari anggota DPRD DIY pada wacana sultan perempuan di karaton Yogyakarta dan dapat mengetahui bagaimana posisi DPRD DIY terhadap paradig politik di Yogyakarta

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana tanggapan dari DPRD DIY isu isu yang berkembang di Yogyakarta mengenai wacana sultan perempuan di kraton Yogyakarta

E. Kerangka Dasar Teori

1. Kepemimpinan

Beberapa pakar telah memberikan definisi yang berbeda tentang kepemimpinan antara lain penulis kutipkan sebagai berikut

Menurut C. N. Cooley (1902)

The leader is always the nucleus or tendency, and on the other hand, all social movement, closely examined will be found to consist of tendencies having such nucleus

Maksudnya pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat.

Menurut Ordway Tead (1929)

Leadership as a combination of traits which enables on individual to induce others to accomplish a given task.

Maksudnya kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya.

Menurut G. U. Cleeton dan C. W. Mason (1934)

Leadership indicates the ability to influence men and secuire results through emotional appeals rather than through the exercise of authority

Maksudnya kepemimpinan menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang orang dan mencapai hasil melalui himbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan.

Menurut P. Pigors (1935)

Leadership is a process of mutual stimulation which by the successful interplay of individual differencess, controls human energy in the pursuit of common cause

Maksudnya kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan perbedaan individu , mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan bersama

Dari seluruh apa yang telah penulis suguhkan di atas Ralph M. Stogdill (1974) menghimpun sebelas kelompok dari keseluruhan definisi kepemimpinan yaitu sebagai berikut :

- a. Kepemimpinan sebagai pusat proses kelompok
- b. Kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat
- c. Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan
- d. Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi
- e. Kepemimpinan sebagai tindakan perilaku
- f. Kepemimpinan sebagai suatu bentuk bujukan
- g. Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan
- h. Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan
- i. Kepemimpinan sebagai hasil interaksi
- j. Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan
- k. Kepemimpinan sebagai awal struktur

Selanjutnya nanti akan disampaikan bagaimana kepemimpinan pemerintahan dalam kultur jawa khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indikator kepemimpinan dalam penelitian ini madalh kemampuan Pengganti Sultan HB X dalam memimpin wilayah DI Yogyakarta

2. Teori Gender

Secara terminologis, 'gender' bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Hilary M. Lips, 1993: 4). Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, 'gender' adalah

pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Elaine Showalter (ed.), 1989: 3). Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang 3 dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar, 1999: 34). Lebih tegas lagi disebutkan dalam Women's Studies Encyclopedia bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Siti Musdah Mulia, 2004: 4). Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Gender berbeda dengan sex, meskipun secara etimologis artinya sama sama dengan sex, yaitu jenis kelamin (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 517). Secara umum sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek aspek nonbiologis lainnya. Kalau studi sex lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang.

3. Kepemimpinan Tradisional

Dalam konteks tradisional, terkadang sumber-sumber kekuasaan itu tidak berlaku. Pemimpin agama dan pemimpin suku misalnya, ditaati bukan karena senjata atau kekayaan, namun kebenaran agama yang "diwakili" dan disebarluaskan oleh

pemimpin agama. Adat dan tradisi menaati kewenangan pemerintah bukan karena takut paksaan fisik atau kehilangan pekerjaan, melainkan lebih dikarenakan kesadaran hukum demi ketertiban umum dan pencapaian tujuan masyarakat-negara. Menurut Max Weber (dalam Sugandi, 2007) terdapat tiga sumber kekuasaan, yaitu: 1. Tradisi. Artinya kekuasaan didapat karena legitimasi adat yang turun temurun. 2. Kharisma. Ini berkaitan dengan watak pribadi yang luar biasa. Seseorang dianggap sah berkuasa jika memiliki watak pribadi yang istimewa seperti kepahlawanan, kesederhanaan, santun, peduli terhadap keadaan, dan sebagainya. 3. Rasionalitas dan legalitas. Artinya legitimasi kekuasaan diperoleh karena ia memiliki jenjang kekuasaan melalui prosedur atau peraturan yang dibuat secara rasional dan legal. Dalam konteks sistem kerajaan, raja sebagai pemimpin tradisional, dipandang sebagai pemilik sah kerajaan melalui kepercayaan adanya wahyu sehingga raja mempunyai otoritas kuat dan dipercaya penuh oleh rakyat. Raja mempunyai wewenang pada rakyat berdasar hubungan kawula-Gusti . Menurutnya, pada jaman penjajahan Belanda, ada dua hal yang membuat posisi Residen (sebagai bagian dari pemerintahan kolonial) di depan elite pribumi dan rakyat itu sulit, yaitu: tradisi dan ideologi panatagama.

Sementara simbol-simbol menegaskan kedudukan Sunan sebagai raja, yaitu sebagai pusat dunia di mana makrokosmos dan mikrokosmos bertemu. Seperti yang dijelaskan oleh Kuntowijoyo bahwa Kraton beserta sistem kekuasaannya adalah kekuasaan yang bersifat kultural ketimbang formalistik. Kekuasaan kultural yang merupakan bagian dari sistem kebudayaan, diartikan sebagai sebuah sistem makna

dan sistem simbol yang teratur, yang di dalamnya interaksi sosial berlangsung. Pada taraf kultural, ada kerangka kerja kepercayaan-kepercayaan, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai. Dengan kerangka kerja itu, para individu mendefinisikan dunia mereka, mengungkapkan perasaan-perasaan mereka dan membuat penilaian mereka. Pada taraf sosial ada proses terus menerus dari tingkah laku interaktif. Menurut Geertz, karena kebudayaan adalah jalinan makna, maka dengan jalinan makna itu manusia menafsirkan pengalaman mereka dan mengarahkan tindakan mereka. Raja sebagai kepemimpinan tradisional diatur dalam sistem kemasyarakatan yang sumber atau proses menjadinya terkadang sulit dilacak/diketahui. Terkadang, ia hanya merupakan dongeng yang diturun-alihkan secara lisan dari generasi ke generasi. Stratifikasi yang ada dalam masyarakat lokal sekaligus mencerminkan sistem pemerintahan (kepemimpinan) yang dianut dan dipraktekkan dalam masyarakat tersebut. Strata tertinggi pada umumnya adalah pemimpin yang paling berkuasa dan selanjutnya strata terendah merupakan kelompok masyarakat yang diperintah atau dikuasai bahkan terkadang disetarakan dengan harta milik yang dalam segala hal harus taat kepada pemimpinnya. Ketaatan kepada sang pemimpin merupakan keharusan sebab hal itu merupakan partisipasi dalam memelihara ketertiban yang telah ditentukan oleh seluruh sistem. Dalam hal ini seorang bangsawan/pemimpin atau Raja ditempatkan sebagai wakil Tuhan di dalam dunia ini. Inilah sumber utama kewibawaan dan kekuasaan sang pemimpin atau Raja. Menurut Ari Dwipayana, menjelaskan beberapa sumber kekuasaan bangsawan (sultan, raja) atau pemimpin tradisional, seperti:

a. Kesatuan yang integral antara istana (keraton, pura, puri, tongkonan) dengan bangsawan. Artinya Istana memberikan makna politis yang sangat besar bagi seorang bangsawan atau pemimpin.

b. Penguasaan secara hegemonik pada level wacana kebudayaan. Hal ini terjadi sebab istana merupakan sumber tunggal produksi wacana pengetahuan, kepercayaan, acuan sistem stratifikasi sosial, simbol status, gaya hidup, dan kesenian masyarakat. Upacara yang dilakukan dalam istana selain bermakna religius, tetapi juga mempunyai makna status serta berfungsi sebagai sarana hiburan bagi rakyat pada umumnya. Karena itu, tidak heran jika upacara sekaten yang dilaksanakan di keraton Surakarta atau Keraton Yogyakarta selalu mendapat perhatian dari seluruh rakyat. Demikian pula dengan benda-benda pusaka selain merupakan karya seni yang menarik tetapi juga merupakan simbol status bahkan menjadi sumber kekuatan atau kesaktian.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005;30) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut

kepentingan umum. Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000;24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan 18 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5. Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta adalah propinsi yang jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanggal 17 agustus 1945, sudah berdaulat menjadi pemerintahan yang syah sehingga oleh NKRI di anggap salah satu daerah istimewa dan gubernur kepala wilayah/kepala daerah dengan serta merta diambil dari sultan Yogyakarta, dimulai dari Hamengkebuwono IX . ketika era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sempat di isukan oleh pihak Mentri Dalam Negeri ketika dipimpin oleh Gamawan Fauzi, untuk kepala daerah DIY dipilih. Hal ini tentu ditentang oleh seluruh rakyat Yogyakarta karena melanggar tentang pemberian keistimewaan Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX atau

lebih dikenal dengan Sultan HB IX menyatakan dukungannya yang penuh kepada Republik Indonesia. Dengan pernyataan ini, maka Republik Indonesia kembali mendapatkan bukti yang nyata adanya pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan.

Sri Sultan HB IX setelah mendengar proklamasi telah dibacakan oleh dua proklamator Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta segera memberi ucapan selamat. Ucapan ini diberikan khususnya untuk Presiden Soekarno atas kemerdekaan Indonesia. Hal ini merupakan tindakan cepat yang prorepublik dan antipenjajah.

Selanjutnya, ketegasan pernyataan Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII tentang dukungannya pada RI itu, dibuktikan dengan adanya amanat yang ditujukan kepada rakyat Yogyakarta. Amanat ini diumumkan pada tanggal 5 September 1945.

Amanat ini mencakup tiga hal, yaitu :

1. Kerajaan Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa dari Negara RI
2. Semua urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dipegang oleh Sultan
3. Sultan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI

Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII adalah salah satu pemimpin yang berpandangan maju ke depan dan proevolusi. Sultan dengan tegas menyatakan akan berdiri dan mendukung RI. Sementara itu, Raja dan Sultan yang ada di tempat lain masih memiliki keraguan untuk mendukung keberadaan RI.

Pernyataan dan amanat ini mempunyai resiko yang sangat besar. Hal ini terjadi karena Sultan dengan berani menghadapi serdadu-serdadu Jepang di Yogyakarta dan sekitarnya yang masih memiliki senjata lengkap. Tidak berbeda dengan di Jakarta, Jepang menjadi penghalang proklamasi yang harus dilawan, maka di Yogyakarta, Jepang juga harus dihadapi dengan kekuatan.

Selain itu, kekuatan asing yaitu Sekutu dan NICA segera masuk ke Indonesia. Pada pertengahan bulan September 1945, pasukan Sekutu yang diboncengi NICA sudah tiba di Jakarta. Setelah NICA masuk di Indonesia, "pemerintahan Hindia Belanda" ini merongrong RI dan mempersempit wilayah RI dengan menyodorkan Perjanjian Linggarjati, Renville, dan lain-lain. Selain itu, NICA membentuk negara-negara boneka agar daerah-daerah tidak setia kepada NKRI. Mereka menjadi penyebab kerusuhan, terror dan pembunuhan. Pemimpin-pemimpin RI merasa terancam dan pemerintahan RI terganggu. Karena itu, ibukota RI harus dipindahkan agar pemerintahan dapat berjalan lancar.

Sebagai kelanjutan dari pernyataan Sri Sultan HB IX mengusulkan agar ibu kota RI dipindahkan ke Yogyakarta, maka pada tanggal 3 Januari 1946 kabinet mengadakan sidang dan menyetujui pindahnya ibu kota RI ke Yogyakarta. Pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta disertai pejabat-pejabat RI menuju Yogyakarta dengan kereta api. Hari berikutnya, Yogyakarta resmi menjadi ibu kota RI sampai dengan penyerahan kedaulatan kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

isi Pernyataan Sri Sultan HB IX :

Kami, HAMENGKUBUWONO IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, menyatakan :

1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas Negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini.

6. Persepsi

Jalaludin Rakhmat (2007: 51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan, Suharman (2005: 23) menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga

aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian. Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

F. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Yang dimaksud dengan definisi konseptual adalah bahwa dalam tahap ini berusaha untuk dapat menjelaskan pembatasan pengertian suatu konsep dengan yang lainnya yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian definisi konseptual adalah definisi yang menggambarkan suatu abstraksi dari hal-hal yang perlu diamati.

a. Kepemimpinan

Adalah adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukannya dalam kerja" dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan sebagai bagian dari peranya memberikan pengajaran/instruksi.

b. DPRD DIY

Adalah anggota DPRD DIY terpilih pada periode 2014-2019 sebagai pelaku pemerintahan di tingkat provinsi yang berfungsi sebagai badan legislative

c. Kraton Yogyakarta

Kraton Yogyakarta atau yang lebih dikenal sebagai Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah museum hidup bagi Yogyakarta atau merupakan cagar budaya Indonesia yang ada di Yogyakarta, Kraton Yogyakarta juga sebagai pusat pemerintahan Yogyakarta pada zaman penjajahan Belanda.

2. Definisi Oprasional

a. Kemampuan Memimpin

Adalah orang yang melakukan kegiatan atau proses mempengaruhi orang lain dalam suatu situasi tertentu, melalui proses komunikasi, yang diarahkan guna mencapai tujuan/tujuan-tujuan tertentu.

b. Sultan Perempuan

Polelemik ini muncul ketika Sri sultan Hamengkebuono X mengeluarkan sabda raja pada 5 mei 2015. Ini sangat berpotensi dengan diangkatnya GKR Pembayun sebagai penerus tahta di kraton Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan penelitian Kuantitatif Penelitian kuantitatif menurut (Kasiram 2008: 149) dalam bukunya

Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menggunakan metoda dan rancangan (design) tertentu dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan sifat masalah yang dihadapi. Berdasarkan sifat-sifat permasalahannya, penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut (Suryabrata, 2000 : 15 dan Sudarwan Danim dan Darwis, 2003 : 69 – 78). a. Penelitian deskriptif b. Penelitian korelational c. Penelitian kausal komparatif d. Penelitian tindakan e. Penelitian perkembangan

2. Populasi

Populasi oleh Sugiyono didefinisikan sebagai generalisasi yang terdiri dari subyek/obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya populasi penelitian adalah 55 anggota DPRD DIY yaitu keseluruhan anggota dewan

Table 1.2

Jumlah Anggota Dewan berdasar Komisi

NO	Komisi	Laki laki	Perempuan	Jumlah
	Komisi A	10	2	12
	Komisi B	10	2	12
	Komisi C	15	0	15
	Komisi D	11	2	13
	Jumlah	46	6	55

3. Jenis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak pertama(baik responden/informan yang diterima oleh peneliti yang sifatnya

masih subyektif karena merupakan pendapat pribadi yang belum diolah dan disampaikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterima secara tidak langsung dari pihak ketiga yang sifatnya cenderung lebih objektif karena sudah diolah dihimpun oleh peneliti melalui jurnal, majalah ilmiah, skripsi, tesis, disertasi dan laporan ilmiah lainnya atau dari monografi setempat.

c. Unit Analisis Data

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah anggota DPRD DIY periode 2014-2019

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik Pengumpulan data dalam Penelitian ini adalah dengan cara Wawancara dan Observasi :

1. Kuesioner

Kuesioner penulis berikan jawaban yang bertingkat setiap tingkat jawaban penulis tidak memberikan bobot melainkan setiap jumlah responden,

penulis melakukan perhitungan dan persentase. Tingkat jawaban tersebut adalah

- a. Sangat setuju atau sangat mampu
- b. Setuju atau mampu
- c. Tidak tahu
- d. Kurang setuju atau kurang mampu
- e. Tidak setuju sama sekali atau tidak mampu sama sekali

Kuesioner ini di bagikan kepada 55 anggota DPRD DIY alasan menggunakan ini supaya memperoleh data yang tepat dalam melakukan penelitian ini

2. Wawancara

penulis perlukan untuk mendampingi kuesioner artinya setiap pertanyaan kuesioner yang belum jelas penulis tanyakan kepada responden dan responden diperbolehkan mengurai dengan rinci. Tahap ini bertujuan untuk mendata hasil hasil yang lebih tepat

3. Observasi

Untuk mencatat keseluruhan hasil penelitian maka penulis akan mencantumkan tabel observasi yang dilakukan setiap hari selama penelitian

4. Dokumentasi

Dokumentasi akan memenuhi data data sekunfder yangh berupa arsip arsip peraturan perundang undangan arsip akhir fraksi dll

I. Tehnik Analisis Data

1. Jenis Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti mengguakan penelitian kuantitatif deskriptif peneliti perlu memperhatikan terlebih dahulu jenis datanya. Jika peneliti mempunyai data diskrit, penyajian data yang dapat dilakukan adalah mencari *frekuensi mutlak*, *frekuensi relatif* (mencari *persentase*), serta mencari ukuran tendensi sentralnya yaitu: *mode*, *median* dan *mean* (lebih lanjut lihat Arikunto, 1993: 363).

Fungsi statistik deskriptif antara lain mengklasifikasikan suatu data variabel berdasarkan kelompoknya masing-masing dari semula belum teratur dan mudah diinterpretasikan maksudnya oleh orang yang membutuhkan informasi tentang keadaan variabel tersebut. Selain itu statistik deskriptif juga berfungsi menyajikan informasi sedemikian rupa, sehingga data yang dihasilkan dari penelitian dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan.

Ciri analisis kuantitatif adalah selalu berhubungan dengan angka, baik angka yang diperoleh dari pencacahan maupun penghitungan. Data yang telah diperoleh dari pencacahan selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh pengguna data tersebut. Sajian data kuantitatif sebagai hasil analisis kuantitatif dapat berupa angka-angka maupun gambar-gambar grafik. Dalam

penelitian ini menggunakan tehnik persentase yaitu menghitung persentase responden dalam mengisi kuesioner